

**IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN DI DESA PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN
HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyusun Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



IDA SALMAH

2022130

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA) AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Ida Salmah

NPM : 2022130

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA
PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN HAUR GADING
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP
NUPTK. 1635759660230282



Mawarti, S.Sos, M.A
NUPTK. 9439768669230332

Mengetahui,



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DESA PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Ibu Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
4. Ibu Mawarti, S.Sos, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengerahan, bimbingan dan petuunjuk kepada penulis.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang sudah mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
7. Serta teman-teman seperjuangan di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Tipe Penelitian.....	36
D. Sumber dan Data	36
E. Desain Operasional	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Uji Kredibilitas Data.....	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	38
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat diwujudkan melalui penyusunan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008. Program ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta didukung oleh berbagai kebijakan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).

Dalam kehidupan bermasyarakat, sanitasi merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat serta menjadi bagian dari pelayanan publik di bidang kesehatan. Upaya peningkatan kualitas sanitasi dilakukan sebagai langkah mewujudkan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional maupun global. Oleh karena itu, diperlukan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri atas lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT),

Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), serta Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT). Pelaksanaan STBM diawali dengan pilar pertama, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, karena pilar ini menjadi pintu masuk dalam mewujudkan sanitasi total serta berfungsi memutus mata rantai kontaminasi kotoran manusia terhadap air minum, makanan, dan lingkungan.

Perilaku buang air besar sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti pencemaran air, tanah, dan makanan, serta menjadi media berkembangnya vektor penyakit. Kondisi lingkungan yang tidak sehat berpotensi memicu berbagai penyakit berbasis lingkungan, antara lain diare, disentri, tifoid, kolera, infeksi cacing, dan penyakit infeksi saluran pencernaan lainnya. Oleh karena itu, program STBM memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan metode pemucuan sehingga terjadi peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Meskipun kebijakan dan program STBM telah diterapkan, pada kenyataannya implementasi di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait Berdasarkan hasil observasi awal penelitian telah ditemukan masalah

1. Sebagian masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading masih melakukan praktik buang air besar sembarangan dengan menggunakan jamban yang tidak

memenuhi standar kesehatan atau langsung ke sungai. Akibatnya, perilaku tersebut bertentangan dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan. Secara normatif, kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, khususnya yang menegaskan bahwa setiap individu wajib menghentikan praktik BABS dan menggunakan jamban sehat sebagai bagian dari Pilar 1 STBM. (*Sumber Data: Kantor Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading*).

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, petugas kesehatan, dan instansi terkait menyebabkan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya Pilar 1 (Stop Buang Air Besar Sembarangan), belum berjalan secara maksimal. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengakibatkan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap mempertahankan kebiasaan lama meskipun fasilitas sudah tersedia. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, yang menegaskan bahwa STBM harus dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, komunikasi, serta koordinasi lintas sektor untuk mendorong perubahan perilaku. (*Sumber Data: Observasi langsung dari peneliti*).
3. Ketidaktepatan sasaran bantuan pembangunan WC sehat. Dalam beberapa kasus, penerima bantuan dipilih berdasarkan hubungan kekerabatan atau

kedekatan dengan aparat desa, bukan berdasarkan tingkat kebutuhan yang sebenarnya. Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan subjektivitas dalam implementasi kebijakan, yang berdampak pada ketidakadilan distribusi bantuan, sehingga mengakibatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak memperoleh fasilitas yang layak, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terhambatnya efektivitas program STBM dalam meningkatkan perilaku sanitasi yang sehat. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 yang menegaskan asas keadilan, non-diskriminatif, dan transparansi, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 yang menekankan pelaksanaan STBM harus tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. *(Sumber Data: Penerima dan Non Penerima Bantuan WC Sehat Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA**

PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan dengan melihat latar belakang agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas dari yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti mengambil teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154). Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan pada desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan pada desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini diantaranya, ialah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan pada desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan pada desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Kebijakan Kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan serta menjadi bahan referensi bagi pembaca dalam memahami peran pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih higienis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara optimal

sesuai dengan tujuan bersama. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sumbangan pemikiran bagi semua pihak baik itu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini semoga berguna bagi seluruh elemen instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan pada desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Aisyah (2024) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai” Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.**

Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah suatu program nasional di bidang sanitasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS), mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga (PAMM-RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Fenomena yang terjadi mencakup tidak optimalnya penggunaan fasilitas WC sehat yang disediakan pemerintah, kurangnya pengelolaan infrastruktur STBM, minimnya sosialisasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, serta kurangnya pengelolaan limbah cair rumah tangga menyebabkan pembuangan sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi program STBM di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Deskriptif) dengan sumber data dari teknik Snowball Sampling yang melibatkan 13 informan. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, bahan referensi,

dan verifikasi informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program STBM di Desa Sungai Pinang cukup baik, dengan indikator pencapaian, sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, organisasi formal, sikap kecenderungan sikap menerima/menolak, kondisi ekonomi, dan politik, sementara kurang baik meliputi ketepatan sasaran kebijakan, target, SOP, organisasi informal, konsisten, sosialisasi, dan kondisi sosial masih perlu peningkatan. Kemudian sudah baik meliputi pemahaman pelaksanaan kebijakan, komunikasi dengan instansi lain. Faktor-faktor pendukung meliputi sumber daya pelaksana, tingkat perubahan yang signifikan sedangkan faktor faktor penghambat meliputi sulitnya merubah perilaku manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan tidak ada penegakkan sanksi yang tegas. Untuk peneliti memberikan saran kepada semua agen pelaksana yang bertanggung jawab supaya lebih memperhatikan lagi dukungan lingkungan sosial masyarakat, baik dari tingkat kesadaran, partisipasi dan keikutsertaan berperan dalam pelaksanaan suatu pertemuan dan mengontrol perilaku-perilaku masyarakat agar tidak lagi menggunakan jamban di sungai, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, melakukan pemilahan sampah, dan membuang limbah cair rumah tangga pada tempatnya.

2. **Bagaskara Dwi Wahyu Jati (2022) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali” Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

implementasi program STBM di Kecamatan Musuk menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle yang terdiri atas: isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Jenis penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan semua parameter dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik. Namun akibat pandemi Covid-19, parameter seperti pelaksana program yakni kegiatan monitoring dan evaluasi serta parameter sumber daya yang digunakan yakni sumber daya dana menjadi terhambat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Robert Eyestone dalam (Didin Muhafidin & Yadiman 2018:1) mengungkapkan bahwa ‘Kebijakan publik menerapkan hubungan antara lingkungan dengan pemerintah tempat mereka bernaung sehingga definisi tersebut dapat dikatakan masih luas dan belum merinci kebijakan publik yang seharusnya’. Thomas R. Dye dalam (Didin

Muhafidin & Yadiman 2018:1) juga mengungkapkan bahwa ‘Kebijakan publik mengarah kepada penerapan apa yang ingin maupun yang tidak ingin dijalankan oleh pemerintah. Definisi tersebut memang sudah mengarah cukup tepat, tetapi tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai pemerintah terhadap keputusan yang dijalankan maupun tidak dijalankan mereka’. Richard Rose dalam (Didin Muhafidin & Yadiman 2018:1) yang merupakan pakar ilmu politik mengatakan bahwa ‘Kebijakan publik seharusnya dipahami tidak hanya sekadar pembuatan kebijakannya saja, tetapi juga harus memikirkan sedikit banyaknya kegiatan yang diterapkan dengan banyaknya konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah daripada hanya menerapkan keputusan yang hanya mementingkan pemerintah sendiri’.

Aminuddin Bakry dalam (Cahyo Samito, *et al* 2020:25-26) mengungkapkan bahwa ‘Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara’. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Pengaturan melalui kebijakan akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder kebijakan, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Di samping itu, kebijakan mempunyai legitimasi yang kuat dalam penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah satu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (William N. Dunn dalam buku Dr. Irawaty Igrisa, 2022:35).

Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam buku (Dr. Irawaty Igrisa, 2022:36), yaitu

- 1) Agenda Setting adalah suatu proses mengupayakan agar suatu masalah publik berubah menjadi agenda kebijakan dan agenda pemerintah. Termasuk didalam hal ini adalah perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah;
- 2) Forecasting (peramalan) memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dengan diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan;
- 3) Adopsi kebijakan (Policy Adoption) yaitu sebuah kebijakan diadopsi karena adanya dukungan mayoritas anggota dewan, adanya konsensus di antara pimpinan lembaga, atau adanya keputusan mayoritas.
- 4) Implementasi Kebijakan (Policy Implementation), yaitu kebijakan yang diadopsi dilakukan oleh badan/lembaga teknis pemerintah dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan.
- 5) Penilaian Kebijakan (Policy Assessment) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga audit pemerintahan dalam menentukan apakah kebijakan eksekutif, tindakan legislatif, dan keputusan pengadilan sesuai dengan persyaratan undang-undang dalam mewujudkan tujuannya.
- 6) Adaptasi kebijakan (Policy Adaptation) Hasil audit dan evaluasi dari lembaga audit dilaporkan kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan bahwa peraturan yang ditulis dengan buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai memerlukan adaptasi kebijakan.

c. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang" berdasarkan dalam

(Hayat, 2017) dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022:26)

mengemukakan 4 (empat) tujuan kebijakan publik, yaitu:

Pertama distribusi sumber daya di tingkat nasional, yang meliputi redistribusi dan penyerapan sumber daya di tingkat nasional. Redistribusi adalah kebijakan yang mengarah pada distribusi sumber daya manusia yang ada sebagai sumber utama kebijakan absortif. Kebijakan absortif adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan penyerapan. Penyerapan penerimaan negara untuk redistribusi nanti sebagai penghalang terhadap kebijakan saat ini, karena kebijakan absortif bertujuan untuk mendukung kebijakan redistribusi.

Kedua untuk mengatur, liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghaspaskan pembatasan atau peraturan). Kebijakan tersebut akan menghasilkan regulasi berdasarkan kesepakatan yang diimplementasikan sebagai kebijakan. Menetapkan peraturan, membuat peraturan perundang-undangan, dan membuat kesepakatan bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk dampak dari kebijakan yang akan terjadi. Pengaturan tersebut untuk memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, kebijakan regulasi akan bertentangan dengan kebijakan deregulasi yang melepaskan, membebaskan, dan mengendurkan semua regulasi yang ada untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang muncul. Proses deregulasi merupakan bagian dari kebijakan publik.

Ketiga, dinamika dan stabilitas. Kebijakan umum adalah menstabilkan keadaan dan kondisi negara. Kondisi stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian dari kebijakan publik. Negara berkewajiban memberikan rasa aman bagi seluruh warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara. Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan konsekuensi dari masyarakat yang sangat interaktif dan sosial, sehingga apapun permasalahan yang menjadi dinamika kehidupan berbangsa, harus diatasi dengan memantapkan keadaan masyarakat. Misalnya, ketika gerakan reformasi sedang bergejolak, negara harus mampu mengambil langkah politik yang konkrit untuk mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi, sehingga kerusuhan yang lebih besar dapat dihindari.

Keempat, memperkuat pasar dan negara. Penguatan pasar karena perekonomian negara bergantung pada pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya harga. Pasar juga berperan dalam perekonomian global. Meningkatkan pasar untuk mencapai stabilitas ekonomi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan dikendalikan. Selain itu, penguatan negara merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengamankannya dari serangan-serangan yang mempengaruhi kedaulatan bangsa dan negara. Keduanya saling menguatkan untuk menjadi negara yang mandiri, sejahtera dan damai.

Nugroho dalam (Hayat 2018:34) mengatakan ‘Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan’. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "to implement". Dalam kamus "to implement" yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan "to partial effect" yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat "implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2017:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuanyang telah diterapkkan". Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi "Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Mazmanian dan Sabatier dalam Hill dan Hupe dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) mendefinisikan bahwa ‘Implementasi kebijakan merupakan penyelesaian atas dasar suatu keputusan kebijakan, pada umumnya berbentuk undang-undang tetapi juga dapat mengambil bentuk keputusan eksekutif yang penting’.

Menurut Nugroho dalam (Junaidi Karso 2021:29-31), pengertian implementasi kebijakan adalah ‘Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang’. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pendapat Nugroho tersebut sejalan dengan pendapat Winarno dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) yang mengemukakan bahwa ‘Implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan’. Sedangkan menurut Meter dan Horn dalam Winarno dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) ‘Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau kelompok, kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya’.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka persiapan proses implementasi kebijakan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok

orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (skripsi Monalisa 2017:19-20) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah bersifat desentralistis.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan *sosial cultural* serta keterlibatan penerima program.
- 2) Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk mengimplementasikan program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

c. Teori Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Leo Agustino 2022:154), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi mensyaratkan implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Menurut Agustino, terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (1) informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implemementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel ini, menurut Edward III adalah:

- a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy): dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan

sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl

van Horn dalam (Azhari Aziz Samudra, dkk 2023:89-91) model ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial-budaya yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Jika tujuan kebijakan terlalu ideal atau utopis dan tidak mempertimbangkan realitas dilapangan, maka kebijakan tersebut akan sulit diwujudkan dan kecil kemungkinan mencapai keberhasilan.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dikelola meliputi manusia, alam, dan informasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Jelas pada model ini pelaksana sangat dominan peranannya. Kebijakan akan tergantung pelaksana tersebut menerima atau tidak sebuah rancangan kebijakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Leo Agustino, 2022:150-153).

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam (Leo Agustino 2022:159), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

1. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
2. Type of Benefits (tipe manfaat)
Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan

5. Program Implementor (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

1. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplemen-tasikan akan jauh arang dari api.
2. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan supra kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

3. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

a. Definisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

- 1) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan

nilai-nilai untuk meraih tujuan. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.

- 2) Strategi Nasional Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Program STBM memiliki indikator *outcome* dan *output*. Strategi Nasional STBM memiliki indikator *outcome* STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ditetapkan sebagai salah satu kebijakan nasional berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 852/MENKES/IX/2008 untuk mempercepat pencapaian MDGs tujuannya yaitu mengurangi hingga setengah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi tahun 2015. Tahun 2014 Kepmenkes ini diperbaharui dengan Peraturan Menteri Masyarakat.

3) Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan program pemerintah dalam hal menciptakan keluarga dan lingkungan yang sehat dengan melakukan lima hal. Adapun kelima pilar tersebut, adalah:

a) Stop Buang Air Besar Sembarangan

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku stop buang air besar sembarangan diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, yaitu:

- 1) Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
- 2) Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.

Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :

a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)

Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.

b) Bangunan tengah jamban

Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu:

- 1) Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus tutup.
- 2) Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).

c) Bangunan bawah

Merupakan bangunan penampungan, pengolah dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:

- 1) Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan

bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.

- 2) Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.

b) Cuci Tangan Pakai Sabun

Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara.

Cuci tangan merupakan salah satu cara untuk menghindari penyakit yang ditularkan melalui makanan. Kebiasaan mencuci tangan secara teratur perlu dilatih pada anak. Jika sudah terbiasa mencuci tangan sehabis bermain atau ketika akan makan, maka diharapkan kebiasaan tersebut akan membawa sampai tua.

Cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu pilar dari STBM yang merupakan program pemerintah dan dianggap

penting untuk dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah makan dapat meminimalisir tertularnya vector penyakit.

1. Pelaksanaan Cuci Tangan Pakai Sabun

Pada dasarnya air untuk cuci tangan hendaknya air yang mengalir. Penggunaan sabun hendaknya mengenai sekuruh tangan dan diperlukan waktu agar kontak kulit dan sabun dapat terjadi. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

- a) Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut.
- b) Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian
- c) Gosok jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih
- d) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan
- e) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian
- f) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua telapak tangan secara bergantian dengan memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu.

Kebiasaan dalam mencuci tangan menggunakan air saja tidak dapat melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang terdapat di tangan. Terlebih jika mencuci tangan tidak dibawah air mengalir. Apalagi kebiasaan menggunakan dan berbagi wadah cuci tangan hal itu sama saja saling berbagi kuman dan tetap membiarkan kuman menempel pada tangan. Kebiasaan itu harus ditinggalkan dan dirubah menjadi yang lebih baik dengan standar prosedur melakukan cuci tangan menggunakan sabun (Kemenkes RI, 2014)

Menggunakan sabun saat mencuci tangan diketahui sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit dan penularan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan merupakan agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari salah satu orang ke orang lain, baik dengan kontak tidak langsung maupun kontak langsung (menggunakan permukaan lain seperti handuk dan gelas) (Kemenkes RI, 2013).

2.Manfaat dari mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, yaitu:

- a) Membunuh kuman penyakit yang ada ditangan
- b) Mencegah penularan penyakit
- c) Mencegah terjadinya keracunan makanan karena tangan penjamah telah memegang bahan kimia
- d) Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman.

3. Aktivitas yang tepat untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mencuci tangan memakai sabun sebaiknya dilakukan sebelum dan setelah beraktifitas. Berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mencuci tangan memakai sabun:

- a) Sebelum dan sesudah makan
- b) Sebelum dan sesudah menyiapkan bahan makanan
- c) Sebelum dan sesudah mengganti popok
- d) Setelah buang air air besar dan buang air kecil
- e) Setelah bersin atau batuk
- f) Sebelum dan setelah menggunakan lensa kontak
- g) Setelah menyentuh binatang
- h) Setelah menyentuh sampah
- i) Sebelum menangani luka
- j) Setelah memegang benda “umum”

Hand sanitizer adalah produk pembersih tangan dalam bentuk gel yang mengandung zat antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air (Depkes RI, 2008).

Perbandingan efektivitas hand sanitizer dengan mencuci tangan memakai sabun, menunjukkan hasil bahwa dapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas pemakaian hand sanitizer dan sabun dalam mengurangi jumlah koloni bakteri pada tangan ($p=0.039$), mencuci tangan memakai sabun dinilai lebih efektif dalam mengurangi jumlah koloni

bakteri pada tangan, dan mencuci tangan dengan sabun masih menjadi pilihan utama dalam menjaga *hand hygiene*.

Efektivitas mencuci tangan menggunakan hand sanitizer terhadap penurunan jumlah angka kuman sebesar 60%. Efektivitas mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptic air mengalir terhadap penurunan jumlah angka kuman sebesar 73%.

c) Pengelolaan Air Minum dan Makanan yang Sehat

Salah satu cara lain yang dapat memutus mata rantai penularan penyakit adalah mengelola air minum dan makanan dengan baik dan sehat. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar. Menurut Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga diwujudkan melalui kegiatan:

- 1) Membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan.
- 2) Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

d) Mengelola Sampah dengan Benar

Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. Sampah rumah tangga yang setiap hari

dibuang oleh masyarakat secara sembarangan menjadikan potensi sebagai sarang serangga pembawa penyakit seperti lalat, kecoa dan lain-lain. Pengelolaan sampah dengan benar akan meminimalisir terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Prinsip-prinsip dalam pengamanan sampah :

- 1) *Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan.
- 2) *Reuse* yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk.
- 3) *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.

e) Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga dengan Benar

Selain sampah, benda padat rumah tangga juga menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang tidak dikelola dengan benar dapat pula menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Selain itu lingkungan akan tampak

kumuh dan tidak indah. Sebaiknya pengelolaan limbah cair ini, masyarakat membuat SPAL (saluran pembuangan air limbah) yang memenuhi syarat, diantaranya sakuran kedap air dan tertutup, terdapat lubang peresapan limbah.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah tentang Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 Tentang Stop Bunag Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala ataupun hipotesis.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah program pemerintah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diselenggarakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Regulasi ini merupakan revisi atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 852/MenKes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah

disahkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).

Dari peraturan tersebut peneliti hanya akan meneliti tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan yang ada di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

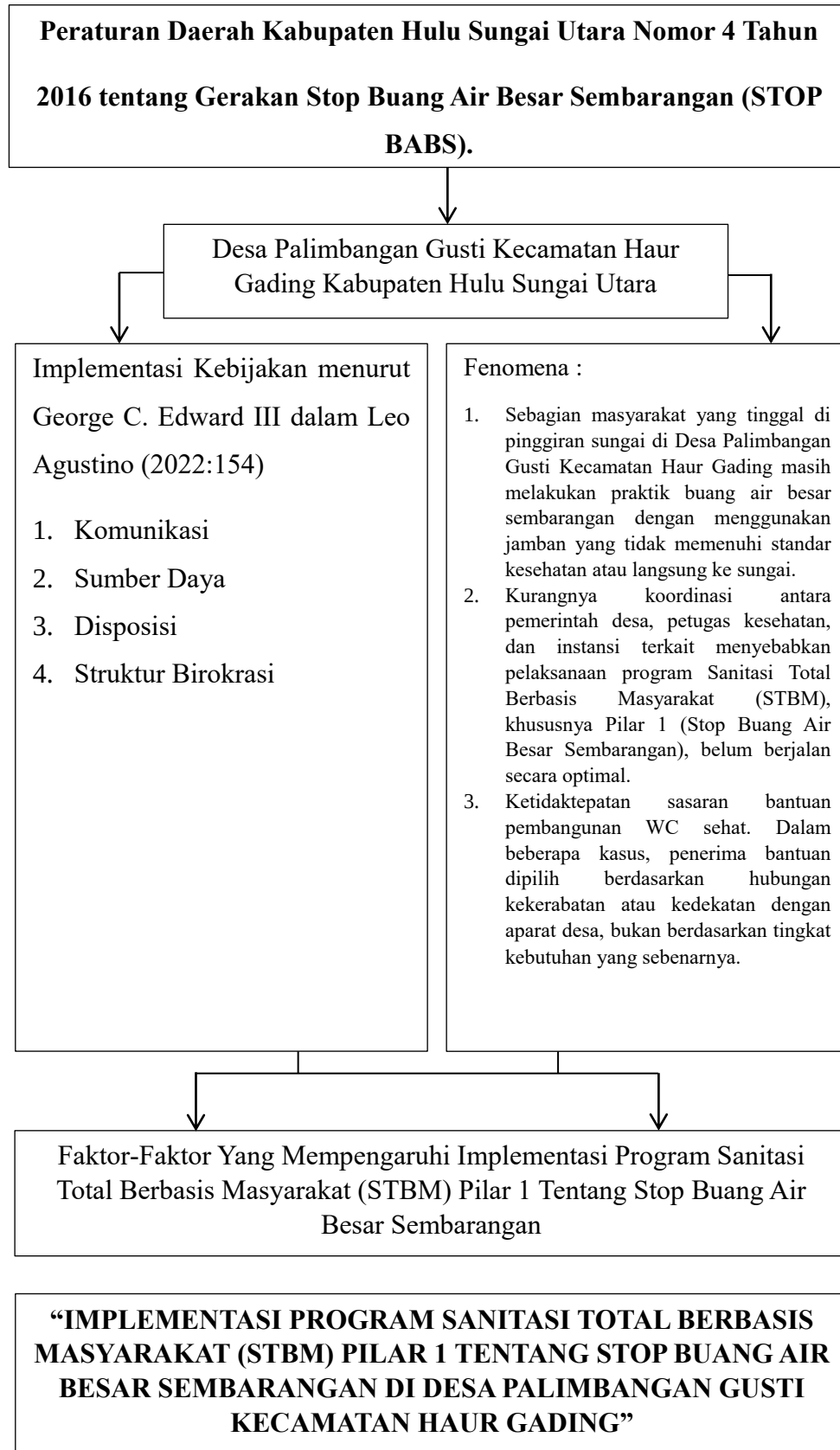
Untuk mengkaji lebih dalam penulis menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154) sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Data
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hal ini tersebut, dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71471. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki keadaan yang representatif dan mewakili kondisi yang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:9) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata, gambar, dan bentuk-bentuk non-numerik lainnya. Semua informasi yang terkumpul dapat menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan yang sebenarnya. Laporan penelitian kualitatif biasanya berisi bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai konteks dan fokus penelitian.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan atau korelasi, kegiatan, pandangan, sikap yang tampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan dan anomali yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

D. Sumber dan Data

1. Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku bacaan yang terkait dalam

penulisan, dokumen-dokumen resmi yang mendukung dalam penulisan, surat kabar, internet, jurna dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan dalam bentuk dokumen, suatu informasi yang dipublikasi, sebuah laporan penelitian dari instansi maupun sumber data lain yang dapat menunjang penelitian (Wahidmurni,2017).

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:138) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Artinya, Purposive Sampling adalah teknik penetapan sampel dengan menentukan sampel yang sesuai dengan pengetahuan tentang tujuan atau masalah dari penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang mana dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Ket.
1	Kepala Bidang fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas kesehatan	1 Orang
2	Anggota Bidang Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas Kesehatan	1 Orang
3	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Orang
4	Sanitarian Puskesmas (Petugas Kesehatan Lingkungan)	1 Orang
5	Kepala Desa Palimbangan Gusti	1 Orang
6	Ketua BPD	1 Orang
7	Masyarakat RT. 001	1 Orang
8	Masyarakat RT. 002	1 Orang
9	Masyarakat RT. 003	1 Orang
10	Masyarakat RT. 004	1 Orang
11	Masyarakat RT. 005	1 Orang
12	Masyarakat RT. 006	1 Orang
Jumlah		12 Orang

E. Desain Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang

digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

No	Variable	Sub Variable	Indikator
1	Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward dalam Leo Agustino (2022:154)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
		2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
		3. Disposisi	a. Efek Disposisi b. Peraturan Birokrasi c. Insentif
		4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional b. Fragmentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan kegiatan berupa mengumpulkan dan mencatat data secara terperinci dan berbagai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Pelaksanaan pengumpulan data tersebut langsung dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Peneliti secara aktif mengamati dan mencatat peristiwa serta perilaku yang terjadi secara alami, spontan, dan tanpa rekayasa dalam kurun waktu tertentu. Hadi dalam (Fauzi, dkk 2022:81) Mengemukakan bahwa ‘Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis’. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait topik penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya. Menurut Moleong dalam (Ibrahim, 2018:88) ‘Percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu’.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah foto, manuskrip, dan dokumen lain yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Dengan kata lain, metode dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya, yang dapat membantu memahami variabel atau aspek tertentu dalam penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, bisa berupa rekaman baik dengan makalah, buku, surat-surat maupun sumber informasi lainnya seperti arsip dalil atau hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya. Mc. Millan dan Schumacher dalam (Ibrahim, 2018:94) *'Documents are record of past events that are written or printed, they may be anecdotal notes, letters, diaries, and documents. Official document include internal paper, communications to various publics, student and personnel files, program description, and institutional statistical data. (Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik institusi)'*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani (2020:163-171) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur

tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2017:338). Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan data yang dipilih. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Pada kondisi seperti ini, peneliti menjadi mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan secara gegabah mengambil simpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tak berdasar. Manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang besar jumlahnya, kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2016:270) ‘Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check’. Pada penelitian ini peneliti melakukan Uji Kredibilitas Data dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data mengenai permasalahan yang telah diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
2. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian adalah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi adalah kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
4. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Menggunakan bahan referensi yaitu bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.
5. Analisis kasus negatif adalah analisis kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian.
6. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Anonim, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Anonim, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Anonim. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Aisyah. (2024). *Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bagaskara Dwi Wahyu Jati. 2022. *Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Cahyo Samito, dkk. 2020. *Kebijakan Publik dan Implementasinya*.
- Didin Muhafidin & Yadiman. 2018. *Pengantar Ilmu Kebijakan Publik*.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson.
- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.

- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karso, Junaidi. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samudra, Azhari Aziz, dkk. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*
- Subarsono, AG. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.